

PERJUANGKAN HAK ASN, BKN BLOKIR LAYANAN SULBAR, ZUDAN : BUANG JAUH – JAUH BALAS BUDI DAN BALAS DENDAM

Sumber : Tribun Sulbar

Pada Tanggal : 16 April 2026

Editor : Ilham Mulyawan



Warga Mamuju
your social media partner, today

Perjuangkan Hak ASN

BKN Blokir Layanan Sulbar,

Zudan : Buang Jauh-jauh Balas Budi dan Balas Dendam

Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Prof Zudan Arif Fakrulloh angkat bicara terkait pemblokiran sementara layanan kepegawaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, melalui pemblokiran akses layanan pada sistem ASN Digital.

Sumber: tribun-sulbar.com

📌 @warga.mamuju

TRIBUN – SULBAR.COM – Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Prof Zudan Arif Fakrulloh angkat bicara terkait pemblokiran sementara layanan kepegawaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, melalui pemblokiran akses layanan pada system ASN Digital.

Pemblokiran ini terkait kebijakan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang membebastugaskan 51 Pejabat Administrator dan 44 Pejabat Pegawai dari Jabatan Strukturalnya.

Pembebasan Jabatan tersebut, dinilai tidak melalui pemberitahuan dan rekomendasi dari BKN, sehingga dinilai menyalahi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN.

Pemblokiran ini rupanya membuat Gubernur Suhardi Duka meradang. Terang – terang SDK menyebut Prof Zudan Over Kekuasaan.

Bahkan SDK – sapaan akrabnya berencana menggugat BKN.

Kepala BKN, Prof Zudan Arif Fakrulloh angkat bicara terkait pernyataan SDK.

Dalam Unggahannya di akun Instagram miliknya, @profzudan, mantan Pj Gubernur Sulawesi Barat Periode 2023 – 2024 itu menyebutkan BKN hanya tegak lurus dengan Hukum Kepegawaian Indonesia, Taat Asas dengan Manajemen ASN dan Landasi dengan Niat.

“Jaga dan lindungi karir ASN. Buang jauh – jauh balas budi, balas jasa dan balas dendam dalam penyelenggaran pemerintahan daerah,” tulis Prof Zudan.

Dalam unggahan berbentuk video itu juga dijelaskan bahwa pemblokiran dilakukan jika Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini kepala daerah melanggar hak – hak ASN.

“Prosesnya tidak tiba – tiba tapi melalui prosedur,” jelas keterangan dalam video tersebut.

TATA ULANG PENGISIAN JABATAN

Dibuka , asalkan Pemprov Sulbar menata ulang pengisian jabatan.

Tentunya mengajukan permohonan rekomendasi ke BKN.

Pejabat yang dinonjobkan, kemudian dikembalikan ke jabatan lain yang setara.

Melalui langkah ini, diharapkan tata kelola manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat kembali berjalan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan NSPK manajemen ASN.

Fungsi pengawasan dan penegakan NSPK ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022, yakni BKN memiliki Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN.

Termaksud memastikan bahwa setiap kebijakan kepegawaian di instansi pemerintah dilaksanakan sesuai dengan NSPK yang telah ditetapkan.

Melalui kewenangan tersebut, BKN dapat melakukan langkah pengendalian administratif apabila ditemukan kebijakan manajemen ASN di suatu instansi, yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagai bagian dari upaya menjaga konsistensi penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sulbar, Herdin Ismail dalam keterangannya beberapa waktu lalu menjelaskan, setiap kebijakan pengangkatan, pemindahan, maupun pemberhentian dari jabatan ASN dilakukan melalui pertimbangan matang dengan memperhatikan aspek strategis.

Langkah tersebut, kata dia, bertujuan mempercepat pencapaian target kinerja serta mengoptimalkan tata kelola pemerintahan.

“Keputusan ini diambil untuk mendukung efektivitas organisasi dan peningkatan kinerja pemerintahan,” kata Herdin.

Kebijakan tersebut kemudian berdampak pada langkah administratif dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menangguhkan sementara layanan kepegawaian Pemprov Sulbar melalui Pemblokiran akses sistem ASN Digital.

Penangguhan ini menghambat sejumlah layanan, di antaranya kenaikan pangkat, mutasi antarinstansi, pemutakhiran data ASN, pemberhentian, pengangkatan CPNS/PNS, hingga proses pensiun.

MASIH KOORDINASI

Herdin memastikan pihaknya akan terus melakukan koordinasi intensif dengan BKN, agar akses system ASN Digital segera dibuka kembali sehingga pelayanan kepegawaian dapat berjalan normal,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, upaya mitigasi terhadap ASN yang terdampak telah dilakukan, termasuk koordinasi dengan Kementerian PAN-RB.

“Mitigasi terhadap ASN yang terdampak pelantikan pejabat eselon III sudah kami lakukan melalui koordinasi dengan BKN dan Kemenpan-RB. Kami berharap persoalan ini segera terselesaikan,” ucapnya.

Seluruh ASN yang terdampak agar tetap menjalankan tugas secara profesional dan penuh tanggung jawab. (*)